



This is an open access article under
CC-BY-SA license

* Corresponding Author

PEMBANGUNAN SOSIAL PADA PENATAAN KAMPUNG KOTA STUDI KASUS KAMPUNG AKUARIUM PENJARINGAN JAKARTA

Gerry Novandika Age¹, Joko Adianto²

¹Universitas Indonesia

Email: [1gerry.novandika@ui.ac.id](mailto:gerry.novandika@ui.ac.id), [2joko.adianto@gmail.com](mailto:joko.adianto@gmail.com)*

Abstract. *The Development perspective that is trapped in sectoral development and oriented towards economic development is in fact largely unable to solve problems in society directly. The majority of settlement arrangements for the urban kampong settlements are carried out by displacing or relocating the settlements which then creates new problems in the community. In the case of the construction of Kampung Aquarium in Penjaringan, D.K.I Jakarta tried to carry out development from the perspective of social development. This study describes the development in urban Kampong arrangement, especially the D.K.I Jakarta Kampung Aquarium by using the concept of social development by describing three elements in the concept, namely structure, culture, and process with an academic text that aims to provide a reference to stakeholders trying as an option in appearance. The method used in this research is a qualitative approach with descriptive explanations by describing case studies on the three elements of social development. The results of this study conclude that the three elements of social development cannot be separated because they are interrelated. Then by using the concept of social development that is applied to the Kampung Aquarium, it can prove that the arrangement of urban village settlements can be completed humanely based on the needs of the community as a goal. As well as in practice the community or residents who live in Urban Kampong are involved in the development planning process up the implementation of development so that the implementation of development can be directly felt by the community.*

Keywords: *Social Development; Urban Kampong Development; Kampung Aquarium; Participation in Development.*

Abstrak. Perspektif pembangunan yang terjebak dalam pembangunan sektoral dan berorientasi pada pembangunan ekonomi nyatanya sebagian besar tidak dapat menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat secara langsung. Penataan permukiman kampung kota mayoritas pelaksanaannya dengan menggusur ataupun merelokasi permukiman yang kemudian melahirkan permasalahan baru pada masyarakat. Pada kasus pembangunan Kampung Akuarium di Penjaringan DKI Jakarta mencoba melaksanakan pembangunan pada perspektif pembangunan sosial. Penelitian ini menjelaskan pembangunan pada penataan kampung kota khususnya Kampung Akuarium DKI Jakarta dengan menggunakan konsep pembangunan sosial dengan menjabarkan tiga elemen pada konsep tersebut yaitu struktur, kultur, dan proses dengan naskah akademis yang bertujuan untuk mencoba memberikan referensi kepada para *stakeholder* perkotaan sebagai opsi dalam penataan permukiman. Metode yang digunakan pada penelitian ini dengan pendekatan kualitatif dengan penjelasan secara deskriptif dengan menggambarkan studi kasus pada ketiga elemen pembangunan sosial tersebut. Pada hasilnya penelitian ini menyimpulkan bahwa ketiga elemen pada pembangunan sosial tidak dapat dipisahkan karena saling berkaitan. Kemudian dengan menggunakan konsep pembangunan sosial yang diterapkan pada Kampung Akuarium dapat membuktikan bahwa penataan permukiman kampung kota dapat diselesaikan secara manusiawi dengan melandasi kebutuhan masyarakat sebagai tujuan. Serta dalam praktiknya masyarakat atau warga yang bermukim pada kampung kota diikuti sertakan dalam proses perencanaan pembangunan sampai pada pelaksanaan pembangunan sehingga pelaksanaan pembangunan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakatnya.

Kata kunci: Pembangunan Sosial; Pembangunan Kampung Kota; Kampung Akuarium; Partisipasi Pembangunan.



PENDAHULUAN

Pembangunan perkotaan yang didominasi pada pendekatan sektoral dapat dilihat hasilnya berupa pertumbuhan secara material seperti pembangunan dari segi infrastruktur. Manifestasi dari pembangunan sektoral tersebut berupa pembangunan pada sektor ekonomi baik pembangunan pada daerah maupun pembangunan nasional (Tarigan, 2006). Hal tersebut meliputi seluruh kegiatan sektoral, yaitu pada sektor primer (sektor pertambangan, sektor pertanian, dan penggalian), setelah itu pada sektor sekunder (sektor listrik, sektor industri pengolahan, gas dan air bersih, dan sektor konstruksi/bangunan), kemudian pada sektor tersier (sektor hotel dan restoran, perdagangan, pengangkutan dan komunikasi, persewaan dan jasa perusahaan, sektor keuangan, serta sektor jasa). Idealnya, pembangunan yang dilakukan harus seimbang baik pada pembangunan sektoral maupun pembangunan sosial dan manusianya.

Masifnya pertumbuhan materil pada kenyataannya, menghadirkan persoalan kompleks dan berkelanjutan dalam pembangunan kota seperti menurunnya tingkat kesejahteraan sosial (akses pekerjaan, kesehatan, pemukiman, kesenjangan) dan kualitas lingkungan. Salah satu kota yang sangat terdampak adalah DKI Jakarta, sebagai kota megapolitan terbesar di Indonesia. Ketimpangan di DKI Jakarta cukup besar jika dilihat dari kepadatan penduduknya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) kepadatan penduduk di DKI Jakarta sangat tinggi dengan rata-rata sebesar 15.938 jiwa/km² atau 118 kali lipat dari rata-rata nasional (Badan Pusat Statistik, 2020). Implikasi dari ketimpangan dan kepadatan penduduk Di DKI Jakarta adalah minimnya lahan bagi akses pemukiman penduduk pendatang hingga berujung pada hadirnya pemukiman-pemukiman kumuh untuk menyalahi akses permukiman tersebut.

Akses pemukiman kumuh yang berada dibawah kategori baik, umumnya ditempati oleh masyarakat menengah kebawah. Sedangkan keseimbangan lingkungan pada dasarnya dapat diciptakan melalui proses pembangunan (Tjahyadi, as cited in Supriyanta, 2002). Pinggiran kali dan daerah resapan air dijadikan pemukiman, akibatnya keseimbangan lingkungan terganggu. Disisi lain, masyarakat menengah kebawah menjadi unsur penting dari perkotaan. Hendrati dalam Supriyanta (2002) mengungkapkan keberadaan masyarakat kelas menengah bawah merupakan salah satu unsur yang diperlukan dalam ekosistem kehidupan pembangunan perkotaan karena mereka dapat

mengisi ruang kosong pada sektor informal. Maka dari itu, dalam permasalahan yang hadir di perkotaan membutuhkan penyelesaian secara intensif tentang tata kelola perkotaan.

Secara karakteristik permukiman kumuh yang berada diperkotaan sebagian masuk ke dalam kategori istilah kampung kota, selaras dengan (Abrams & Turner, as cited in Widjaja, 2013) menjelaskan bahwa kampung kota adalah kawasan permukiman yang kumuh dan memiliki sarana umum yang termasuk dalam kategori sangat buruk bahkan tidak ada sama sekali. Selain itu sering sekali kawasan kampung kota disebut *squater* atau *slum*.

Penjelasan yang lebih terperinci kampung kota dapat digambarkan seperti suatu lingkungan permukiman yang mempunyai penduduk sangat tinggi, dari kumpulan rumah yang ada memiliki konstruksi bangunan yang temporer ataupun semi permanen, halaman yang dimiliki tidak cukup kemudian sarana dan prasarana lingkungan fisik juga kurang memadai. Pada umumnya lingkungan tersebut dikelilingi oleh bangunan yang permanen (Sujarto, as cited in Widjaja, 2013).

Perspektif pembangunan sektoral, secara mayoritas masih menganggap bahwa kampung kota adalah wilayah permukiman kumuh dan mengganggu prinsip penataan kota yang teratur. Pada realitasnya penyelesaian persoalan-persoalan pembangun kota di DKI Jakarta dilakukan dengan pendekatan relokasi (penggusuran), lebih dari 300 kasus pada tahun 2015-2017 dan 79 kasus 2017-2020 telah terjadi (LBH Jakarta, 2017). Pendekatan pembangunan sektoral tidak menyelesaikan persoalan seutuhnya, dengan tidak adanya partisipasi dan peningkatan taraf hidup masyarakat, oleh karenanya perlu pendekatan pembangunan yang lebih humanis.

Salah satu kawasan kampung kota pada wilayah DKI Jakarta yang mengalami penggusuran adalah Kampung Akuarium Penjaringan, yang pada era kepemimpinan Gubernur Basuki pada 11 April 2016 wilayah tersebut digusur, dengan landasan masuk pada zonasi kawasan cagar budaya selain itu juga dianggap sebagai permukiman kumuh. Kemudian wilayah tersebut akan dibangun *sheet pile* tepat pada permukiman masyarakat yang berdekatan dengan Museum Bahari serta Pasar Ikan dan akan dibentuk tanggul untuk mencegah air laut masuk.

Secara struktur landasan penataan kota yang dilakukan pada kawasan berasal dari rencana induk penataan kawasan Kota Tua yang diatur di dalam Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2014. Kemudian dampak dari kebijakan tersebut membuat mayoritas warga kehilangan tempat tinggal dan

pekerjaan yang kemudian mensiasati tempat tinggal masyarakat setempat dengan membangun tenda-tenda darurat untuk tempat tinggal yang kemudian juga dianggap ilegal.

Kemudian pada era Gubernur Anies diterbitkan Keputusan Gubernur Nomor 878 Tahun 2018 tentang Gugus Tugas Pelaksanaan Penataan Kampung dan Masyarakat. Aktualisasi Keputusan tersebut salah satunya adalah penataan ulang kampung kota salah satunya Kampung Akuarium yang kemudian akan dibangunnya tempat tinggal bagi warga yang tergusur dengan konsep Kampung Susun Bahari disertai sektor penunjang dalam kehidupan seperti pasar ikan kemudian infrastruktur dan fasilitas layanan lainnya. Keputusan Gubernur tersebut menjadi pembuka landasan kebijakan penataan kampung kota karena terminologi permukiman kampung secara substansial pada perkotaan belum pernah ada dalam landasan struktur ataupun peraturan di DKI Jakarta. Adapun terminologi kampung hanya dinyatakan sebagai bentuk bangunan dan dianggap sebagai bagian dari kawasan dan bagian cagar budaya seperti Perkampungan Pecinan, Perkampungan Luar Batang, dan Perkampungan Situ Babakan.

Dengan adanya Keputusan Gubernur Nomor 878 membuat terminologi kampung terbawa dalam wacana pembangunan perkotaan sehingga kampung kota mendapat kesempatan yang sama dalam pembangunan. Menurut Suparwoko (2013) sejarah pembangunan permukiman di Indonesia dimulai dari tahun 1924 sampai saat ini masih belum ada yang menyajikan secara langsung dukungan untuk pengentasan kemiskinan. Dari pernyataan tersebut selaras dengan Mirza (2012) bahwa peningkatan pendapatan masyarakat dapat diatasi dengan pembangunan manusia secara kualitas sumber daya.

Pembangunan dengan pendekatan humanis dapat diwujudkan dengan konsep-konsep yang berpedoman pada kesejahteraan sosial, namun hal itu tidak dapat terwujud secara merata jika pembangunan difokuskan pada pembangunan infrastruktur semata, selain itu juga harus menjadikan pembangunan manusia setara dengan pembangunan sektoral. Dengan melihat perspektif *people centered development* yang bertujuan demi meningkatkan pada pertumbuhan dan juga kesejahteraan manusia, serta meningkatkan keadilan yang berkesinambungan (Korten, as cited in Adi, 2008). Dari perspektif tersebut yang pemikiran yang mendominasi adalah pembangunan yang sangat memperhatikan pada keseimbangan ekologi manusia. Melihat dari kasus yang ada terkait dengan pembangunan Kampung Susun Bahari di Kampung Akuarium terlihat lebih mengedepankan pada perspektif pembangunan sosial dan manusianya. Untuk menjabarkan secara lebih terperinci, rtikel ini

memakai pendekatan pembangunan sosial yang dijelaskan oleh Wirutomo (2013) elaborasi antara pembangunan struktural, kultural, dan proses dalam menganalisis penyelesaian persoalan permukiman Kampung Kota pada Kampung Akuarium. Dengan memakai pendekatan pembangunan sosial pada penelitian ini diharapkan dapat lebih menjelaskan secara akademis bagaimana opsi pendekatan pembangunan sosial pada penataan hunian dapat direalisasikan.

METODE

Berdasarkan pendahuluan dari penelitian, metode penulisan dengan mendeskripsikan konsep pembangunan sosial dengan elemen penjabarannya serta menemukan gambaran pada pembangunan sosial (pembangunan struktur, kultur dan proses) pada penataan kampung kota khususnya Kampung Akuarium di DKI Jakarta. Kemudian, pada artikel ini akan menguraikan elemen yang ada pada pembangunan sosial dapat berkorelasi dengan studi kasus yang diambil, secara teknis kebijakan Pemerintah Provinsi, partisipasi masyarakat, serta proses yang terjadi dapat beririsan dengan konsep pembangunan sosial. Dengan demikian melihat dari penjelasan diatas pendekatan yang diperlukan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

Pada proses pengumpulan data metode yang dipakai adalah dengan menggunakan studi literatur, wawancara, dan juga observasi yang dilakukan dilapangan. Beberapa literatur yang dipakai terkait dengan studi kasus artikel ini seperti undang-undang, data statistik, dokumen perencanaan, serta berbagai penelitian sebelumnya yang berkaitan. Wawancara yang dilakukan dengan melibatkan salah satu representatif warga Kampung Akuarium sebagai informan untuk memperoleh gambaran dari dampak yang terjadi kepada warga dari kebijakan yang dilakukan serta aspirasi dan mengkonfirmasi data literatur dengan realitas lapangan.

HASIL DAN DISKUSI

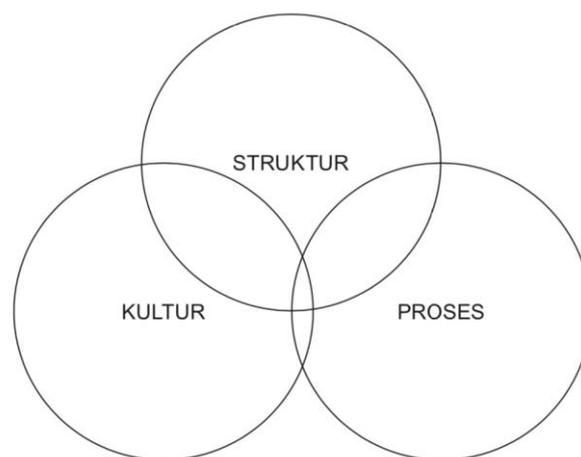
Makna pembangunan sosial acap kali masih bias, makna sosial seringkali diartikan secara variatif. Jika kita melihat dari kata, secara harafiah akan terdapat beberapa makna (Madjid & Wirutomo, 2006). Arti sosial tidak dapat dimaknai secara individual, hal ini dikarenakan perencanaan sosial berpusat tidak pada transformasi individu atau perseorangan juga tidak pada salah satu kelompok atau eksklusif, melainkan transformasi masyarakat yang membuatnya menjadi suatu sistem. Pada sudut pandang pembangunan sosial, keikutsertaan masyarakat tidak hanya menjadi alat ataupun cara melainkan tujuan, hal ini dikarenakan partisipasi aktif masyarakat pada pembangunan suatu usaha

penciptaan kesetaraan sarana serta hak manusia secara hakikatnya atau dapat diartikan sebagai inklusi sosial (Conyers, 1982, Midgley, 1995, Haralombos, 2008, as cited in Wirutomo, 2012). Maka dari itu pembangunan sosial ialah usaha penyempurnaan manusia pada kehidupan sosial.

Di tengah komentar kritis yang melimpah tentang strategi yang berorientasi pada pertumbuhan dan pembangunan manusia diusulkan versi baru dari konsep pembangunan sosial. Konsep perkembangan sosiologis ini diusulkan berdasarkan argumen bahwa tujuan akhir dari setiap perkembangan haruslah perubahan dan kemajuan dalam kehidupan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya perubahan individu atau kelompok (Hardjosoekarto, 2012). Pembangunan sosial adalah pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan sosial yang inklusif, yang antara lain ditandai dengan perubahan norma dan nilai dalam pranata sosial.

Menurut (Wirutomo, 2011, as cited in Hardjosoekarto, 2012) setiap perkembangan harus mempromosikan pola baru interaksi sosial, dan pola hubungan sosial yang bahkan lebih dalam. Pembangunan sosial adalah pembangunan yang menjamin perubahan dan peningkatan unsur-unsur dasar kehidupan bermasyarakat, yang terdiri dari struktur sosial, budaya, dan proses sosial. Maka dari itu penjabaran pembangunan sosial akan dibagi menjadi tiga pembahasan diskusi, yang *pertama*, pembangunan sosial struktur, *kedua* kultur, dan *ketiga* proses.

Pada kenyataan kehidupan, struktur, kultur dan proses tidak dapat berdiri dengan sendiri-sendiri, namun pada skala tertentu saling berkesinambungan dan saling menopang sehingga membuat suatu sistem yang berkesatuan yang menjadi kompleks. Hal yang dilakukan secara sistematis dan direncanakan secara baik dipergunakan untuk membangun nilai dari tiga elemen dasar *societal* tersebut yang dapat disebut sebagai pembangunan sosial. Jika hal tersebut tercipta maka akan menghasilkan kehidupan sosial yang lebih setara atau emansipatoris dan memberikan kesejahteraan dan hak dasar untuk semua masyarakat (inklusif). Maka dari itu, pembangunan pada bidang apapun (fisik, ekonomi, agama, dan hukum,) harus dilandasi dari pembangunan yang berdasarkan elemen dasar tersebut yang dapat diilustrasikan pada gambar berikut;



Pembangunan Sosial Elemen Stuktur

Secara definisi struktur ialah mekanisme hubungan, terutama pada hubungan yang ada pada kekuasaan, diantara kelompok sosial yang dijelaskan dalam stratifikasi, komposisi sosial, serta diferensiasi sosial. Dapat diartikan pada perbedaan kekuasaan yang terjadi, struktur dapat menghasilkan daya yang berkarakter memaksa (*coercive*), kemudian memerintah (*imperative*), dan juga menghambat (*constraining*) dari tindakan yang dilakukan manusia (*actor*). Daya struktur sosial dapat terlembaga (*institutionalized*) sebagai legal-formal, sama halnya undang-undang, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ataupun yang tidak dikeluarkan. Hal ini kemudian dapat diartikan pembangunan sosial ialah cara dalam usaha untuk menyeimbangkan relasi kekuasaan antara pemerintah dan rakyat ataupun kalangan kaya dan miskin dengan kebijakan pembangunan dan undang-undang yang lebih membuat rakyat diuntungkan. Jika dimaknai secara ringkas, pembangunan struktur ialah usaha menyempurnakan struktur yang tidak adil ataupun diskriminatif (eksklusif) diarahkan menjadi adil dan memberikan kesamaan hak (inklusif).

Struktur sosial dijelaskan dalam sosiologi adalah tatanan lembaga yang khas dan juga stabil dengan melihat dalam masyarakat manusia yang hidup bersama dengan berinteraksi. Struktur sosial sering diperlakukan bersamaan dengan perspektif perubahan sosial yang berkaitan dengan kekuatan-kekuatan yang mengubah struktur sosial dan organisasi masyarakat. Meskipun secara umum disepakati bahwa istilah struktur sosial mengacu pada keteraturan dalam kehidupan sosial seperti adat istiadat, tradisi, peran, atau norma.

Struktur sosial terkadang diartikan sebagai hubungan sosial yang berpola pada aspek reguler kemudian berulang, antara anggota yang

berinteraksi entitas sosial tertentu. Bahkan pada tingkat penjelasan tersebut, konsepnya sangat abstrak hanya memilih elemen tertentu dari aktivitas sosial yang sedang berjalan. Hal ini dapat dijelaskan bahwa semakin besar entitas sosial yang diperhitungkan, maka semakin abstrak konsepnya. Oleh karena itu, perspektif struktur sosial suatu kelompok kecil umumnya lebih erat kaitannya dengan aktivitas sehari-hari para anggotanya daripada struktur sosial masyarakat yang lebih besar. Dalam studi kelompok sosial yang lebih besar, masalah pemilihannya akut dan banyak bergantung pada apa yang dimasukkan sebagai komponen struktur sosial. Berbagai teori menawarkan solusi berbeda untuk masalah penentuan karakteristik utama dari suatu kelompok sosial.

Pada konteks pembangunan sosial di kampung akuarium yang menjadi bagian dari elemen struktural yang pertama adalah mengacu pada janji politik Anies Baswedan, yaitu "Maju Kotanya, Bahagia Warganya" sejak kampanye pemilihan Gubernur 2017, Anies Baswedan menjadikan kampung Akuarium sebagai salah satu panggung untuk menunjukkan keberpihakannya pada masyarakat menengah kebawah sebagai subjek ketimpangan dan ketidakadilan di DKI Jakarta. Poin pertama dalam visi-misi DKI Jakarta sejak kepemimpinan Anies Baswedan adalah menjadikan Jakarta kota yang sehat, aman, cerdas, dan berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai kekeluargaan serta memberikan ruang pada kreatifitas dengan kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan, serta memanusiakan (PPID Jakarta, 2019). Penjabaran visi misi tersebut dengan diangkatnya nilai kultural (berupa ruang partisipasi dan inklusif) ke dalam struktul formal (visi-misi).

Anies dengan konsisten menerjemahkan visi misi pembangunan inklusif ke dalam kebijakan pada pembangunan kota serta rincinya lebih dalam kepada program, proyek, dan anggaran yang merupakan aspek dari struktural. Pembangunan struktural seperti ini dengan menggabungkan aspek struktur (kekuasaan) dan kultural (partisipasi masyarakat) yang memberi arah dalam pembangunan sosial. Dengan pola seperti ini dapat merubah hubungan antara kekuasaan dengan masyarakat. Salah satunya adalah dengan keluarnya Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 90 Tahun 2018 tentang Peningkatan kualitas pemukiman dalam rangka penataan kawasan pemukiman terpadu, dan kemudian setelah itu dibentuknya tim kerja melalui kebijakan Keputusan Gubernur Nomor 878 Tahun 2018 tentang Gugus Tugas Pelaksanaan Penataan Kampung dan Masyarakat yang lebih mengedepankan pembangunan yang kuat akan partisipasi masyarakatnya. Sebelumnya kebijakan dalam Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2014

tentang rencana induk penataan kota tua yang pada aktualisasinya mengorbankan permukiman warga khususnya wilayah kampung akuarium dan juga hancurnya beberapa situs sejarah yang ada di kota tua (Lutfiana et al., 2019).

Keputusan Gubernur yang dikeluarkan secara terperinci menetapkan 21 wilayah kampung kota yang tersebar di DKI Jakarta salah satunya yang paling menjadi sorotan adalah wilayah Kampung Akuarium. Pada beberapa lokasi tersebut penataan yang dilakukan menggunakan perspektif *Community Action Planning (CAP)*. Gerakan kolaboratif menjadi andalan Anies untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar tidak hanya menjadi objek melainkan juga subjek pembangunan (Firdaus, 2018). Hal ini menggambarkan struktur baru yang ada membuat kultur baru pada masyarakatnya. Sebelumnya struktur dengan kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2014 tentang rencana induk penataan kota tua menghasilkan kultur baru masyarakat terkait dengan pengurusan, selanjutnya Anies meresponnya dengan struktur baru yang dikeluarkan yaitu kebijakan Keputusan Gubernur Nomor 878 Tahun 2018.

Kebijakan baru yang menjadi menarik adalah melibatkan lebih banyak masyarakat dalam pembangunan seperti mengikutsertakan masyarakat dalam swakelola pembangunan. Landasan dari skema swakelola yang dimaksud telah tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pada konteks penataan Kampung Kota menjadikan pemerintah Provinsi sebagai kolaborator yang kemudian masyarakat sebagai *co-creator*. Selain peningkatan partisipasi masyarakat, hal ini juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat juga dikelola oleh warga sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menurut Mkandawire (2001) kebijakan sosial harus dirancang tidak hanya untuk menampung korban sosial, tetapi juga diintegrasikan sebagai komponen utama kebijakan untuk memastikan keberlanjutan kebijakan tersebut. Tidak semua elemen kebijakan sosial perlu diungkapkan secara eksplisit. Misalnya, kebijakan sosial dapat dimasukkan ke dalam kebijakan ekonomi, ketika yang terakhir dimaksudkan untuk konsekuensi kesejahteraan atau mencerminkan prioritas sosio-ekonomi implisit atau eksplisit, seperti mengurangi tingkat pengangguran yang tidak dapat diterima secara politik. Namun demikian, beberapa elemen kebijakan sosial lebih eksplisit, seperti penyediaan kesejahteraan sosial oleh pemerintah secara langsung, sebagian melalui layanan dan subsidi sosial yang merata.

Kebijakan dengan pendekatan sosial merupakan intervensi kolektif yang secara langsung mempengaruhi transformasi dalam kesejahteraan sosial, institusi sosial dan hubungan sosial. Kesejahteraan sosial mencakup akses ke mata pencaharian dan pendapatan yang memadai dan terjamin. Hubungan sosial berkisar dari mikro hingga global, meliputi hubungan kelas, komunitas, etnis, jenis kelamin, dll. Institusi sosial merupakan kendala yang telah dirancang dengan manusiawi serta membentuk interaksi manusia atau aturan main dalam masyarakat (North, as cited in Mkandawire, 2001). Saat ini secara luas diakui bahwa hal tersebut adalah penentu penting dari pembangunan ekonomi yang kemudian memfasilitasi pencapaian di bidang-bidang tersebut. Sekarang ada wacana global yang menuntut bahwa hak-hak sosial harus dihormati dalam proses pembangunan ekonomi. Perkembangan ekonomi dan disiplin ilmu lain telah memberikan dorongan untuk analisis baru serta penemuan kembali beberapa yang lama. Wawasan pembangunan mengedepankan apa yang sampai sekarang telah diperlakukan secara pasif, reaktif dan sekunder untuk masalah makroekonomi pada pertumbuhan dan pembangunan.

Pembangunan Sosial Elemen Kultur

Ketika membahas hal yang paling fundamental dari masyarakat salah satunya adalah kultur, hal ini dapat dikatakan fundamental karena salah satu elemen yang mendarah daging di masyarakat sehingga sulit untuk berubah jika tidak ada intervensi dari luar. Secara definisi kultur merupakan emosi, ekspresi pikiran dan jiwa pada cara-cara hidup kemudian berpikir, seni susastra, pergaulan hidup, perilaku menjalankan agama, rekreasi yang dapat memenuhi kebutuhan hidup pada manusia. Kultur dapat dijadikan sebuah panduan untuk kelompok masyarakat saat berperilaku dan bertindak. Semakin kompleks yang terjadi di masyarakat, maka akan semakin kompleks juga perilaku komunikasi yang dijalani (McIver, as cited in Soekanto, 2002). Salah satu cara dalam merubah kultur adalah dengan struktur yang berkaitan pada pengembangan kebijakan. Perubahan yang terjadi pada dimensi kultural yang berkaitan pada perubahan kebudayaan yang ada pada masyarakat, seperti penemuan (*discovery*) ketika berpikir (ilmu pengetahuan), pembaharuan pada hasil (*invention*) teknologi, hubungan pada kebudayaan lain sehingga menyebabkan terjadinya akulturasi dan peminjaman kebudayaan (Ogburn, as cited in Soekanto, 2002).

Konteks struktur dalam pembahasan penelitian ini adalah kebijakan, kebijakan tersebut salah satunya adalah Keputusan Gubernur Nomor 878 seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kebijakan tersebut menjadi akar perubahan struktur dari yang ada sebelumnya di Kampung Akuarium, perubahan struktur yang terjadi merupakan komitmen Anies selaku Gubernur pada nilai inklusi dengan menghadirkan kebijakan tersebut. Hal ini menjelaskan bahwa faktor kultural yang dibentuk oleh Anies adalah dengan landasan perubahan struktur dengan kebijakan tersebut. Jika dijelaskan secara kronologi peristiwa ini menggambarkan bahwa kultur menghadirkan struktur yang kemudian struktur tersebut menghadirkan kultur baru dalam masyarakat (*structure-culture self-reinforcing process*).

Pada kasus Kampung Akuarium, usaha struktural demi membangun kebudayaan ditandai dengan kebijakan pembangunan Kampung Susun Bahari Kampung Akuarium, pertimbangan yang dilakukan adalah dengan mempertegas arah pada sektor budaya Kampung Akuarium yaitu budaya bahari dan mengembangkan identitas kampung kota. Pentingnya hal tersebut dilandasi dari usaha untuk menanggulangi terjadinya proses kemunduran budaya bahari di DKI Jakarta dan krisis penyelesaian permasalahan kampung kota.

Mengenai perspektif pembangunan sosial, harus dilakukan cara bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi secara nyata. Hal ini dilakukan oleh Anies dengan mengajak masyarakat berdiskusi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat setempat dibantu dengan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat. Kawasan permukiman Kampung Akuarium merupakan kawasan yang termasuk kedalam kawasan cagar budaya, untuk memulai pembangunan dibangun jalur khusus untuk masuknya alat berat untuk menunjang pembangunan kawasan tersebut. Jalur khusus yang dibuat bertujuan demi menjaga salah satu cagar budaya yaitu pasar Hexagon yang berda di wilayah tersebut. Dengan mengutip perkataan Anies bahwa Pasar Hexagon berada di daerah sekitar dan termasuk kedalam cagar budaya, maka dibuatlah jalur ini untuk menghindari kerusakan cagar budaya (Wiryo, 2020).

Hal yang dilakukan tersebut merupakan salah satu usaha pembangunan sosial kultural yang diterapkan dalam Kampung Akuarium untuk menjaga cagar budaya agar tetap dilestarikan. Stetmen lain yang diutarakan Anies yang berkaitan dengan pembangunan kultur kampung yang ada di DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

Perencanaan pembangunan Kampung Akuarium dapat di jadikan suatu contoh pada penataan pembangunan kampung di wilayah Jakarta, hal ini menjadi penting karena kampung adalah salah satu elemen dari bagian sejarah kota. Maka dari itu kampung kota harus tetap berkembang selaras dengan zamannya (Umasugi, 2020).

Pada hal ini, kampung adalah bagian dari pembentukan sejarah Kota DKI Jakarta. Kampung kota merupakan titik awal budaya dapat lahir dalam perkotaan lahir sebelum terjadinya akulturasi budaya dari wilayah lain. Komitmen pembangunan kampung Akuarium merupakan bagian besar dari pembangunan sosial pada elemen kultural.

Wilayah Kampung Susun Akuarium yang akan dibangun merupakan lahan yang terbentuk dari hasil sedimentasi tanah pada aliran dari sungai Ciliwung sehingga membentuk pulau. Pulau yang terbentuk tersebut terjadi sejak abad 18 dan berlokasi antara Pelabuhan Sunda Kelapa dan Museum Bahari. Wilayah ini menjadi penting dalam sejarah di Batavia era kemerdekaan kemudian juga sejarah Jakarta kekinian. Nama Akuarium sendiri hadir untuk mengganti nama Pusat Laboratorium Penelitian Laut pada 1950 saat peristiwa Pemerintah Indonesia mengakuisisi Pusat Laboratorium dari Belanda. Kemudian Pemerintah Kota pada era tersebut mengganti Laboratorium Wisata Akuarium sehingga membuat perjalanan sejarah yang ada menjadi semakin melekat. Karena sejarah kebudayaan tersebut maka pembangunan kembali Kampung Susun Bahari merupakan bagian dari pembangunan sosial pada elemen kultur karena yang sebelumnya telah digusur.

Pembangunan yang dilakukan akan terintegrasi pada kawasan cagar budaya. Kawasan cagar budaya yang berada pada wilayah tersebut adalah benteng yang dibangun pada era penjajahan Belanda dan juga Musium Bahari yang berdekatan dengan permukiman. Rancangan pengintegrasian yang dilakukan akan di rilis setelah selesai dirumuskan bersama dengan masyarakat yang juga disebut *Community Action Plan* (CAP). Dengan landasan tersebut Pemerintah Provinsi semakin yakin menjadikan kawasan percontohan pada wilayah tersebut karena bekerja langsung dengan masyarakat. Seperti yang dikatakan Anies bahwa rancangan pembangunan Kampung Akuarium tidak hanya dikerjakan oleh pihak luar, namun juga melibatkan masyarakat dengan bekerjasama. Hal ini dapat menjadi percontohan karena masyarakat merancang permukimannya dengan sendiri dengan kebutuhan saat ini dan nanti sesuai dengan aturan yang berlaku (Umasugi, 2019).

Memiliki cagar budaya menjadi suatu kelebihan wilayah tersebut, maka dari itu pembangunan yang dilakukan juga akan dikembangkan dengan menghadirkan kawasan cagar budaya. Ada beberapa lokasi pada wilayah tersebut yang termasuk ke dalam cagar budaya, dengan adanya hal tersebut dapat dilakukan kegiatan *cultural tourism* dan wisata budaya. Kegiatan tersebut juga akan dirilis bersamaan dengan perencanaan pembangunan.

Pembangunan yang dilakukan terhadap permukiman baru dilakukan dengan konsep rumah berlapis. Pada perencanaan anggaran, hal tersebut diusulkan pada Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) pada APBD 2020. Rumah berlapis yang akan dibangun dapat dikatakan seperti rumah susun vertikal, namun maksimal lapisan hanya empat lantai. Hal ini dilakukan demi menjaga dan meningkatkan interaksi sosial warga yang sudah terbangun dari sebelumnya. Desain permukiman dengan lapisan lantai yang tidak terlalu banyak dapat membuat antara warga tetap dapat berinteraksi secara intim berbeda dengan desain seperti permukiman *apartment* yang membuat minim interaksi antar penghuni.

Untuk menguatkan bahwa pembangunan kampung susun Bahari merupakan kebutuhan masyarakat, penulis mengutip tanggapan dari warga sekitar sebagai berikut:

Predikat orang kota secara kultural identik dengan warga asli Kampung Akuarium, hal ini terjadi karena warga lahir di wilayah cagar budaya. Kehidupan yang berjalan berdampingan dengan sejarah, bahkan kenal dekat dengan sejarah Batavia sampai Jakarta. Menjadi kebanggaan bagi warga dengan hidup di kawasan sejarah Jakarta (Diani, as cited in Mahmud & Ardianto, 2020).

Selanjutnya, warga juga berharap pembangunan Kampung Susun Bahari adalah salah satu bukti bahwa cagar budaya dapat lestari berdampingan dengan permukiman warga, selain itu juga menjadi momentum peningkatan pada sektor perekonomian warga dengan memanfaatkan pada pariwisata dengan stetmen sebagai berikut:

Dengan adanya pembangunan tersebut tentunya mempunyai banyak dampak positif bagi warga pemukim, sebagian warga dapat bekerja pada sektor pariwisata seperti menjadi *tour guide* atau dengan berkarya menjual souvenir. Saat melakukan wisata dahulu wisatawan asing sampai menginap di permukiman warga untuk melakukan wisata

pada kawasan Kota Tua (Diani, as cited in Mahmud & Ardianto, 2020).

Perencanaan pada pembangunan wilayah Kampung Akuarium dilakukan secara kolaboratif dengan warga. Secara teknis, warga memberikan rekomendasi desain awal pembangunan sesuai kebutuhan warga kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang kemudian dijadikan desain perencanaan pada Dinas Perumahan dan Permukiman DKI Jakarta. Cara pendekatan yang bersifat kolaboratif pada pembangunan kembali kawasan Kampung Akuarium menjadi titik awal tren penataan permukiman kolaboratif dengan masyarakat di Jakarta.

Dari penjelasan di atas, pembangunan wilayah Kampung Akuarium merupakan salah satu pembangunan sosial yang berfokus pada sektor kultural, namun berada pada pembangunan sektoral. Namun bagaimana menjelaskan pembangunan sosial pada sektor kultur pada aspek manusia atau pada individu masyarakat setempat. Pada realitasnya, budaya masyarakat setempat tidak ada yang terlihat terlalu berbeda dengan masyarakat kota pada umumnya. Dilihat dari faktor kesukuan, wilayah tersebut sejak terbangunnya kampung Akuarium sudah banyak percampuran suku yang menetap dari orang tua sebelumnya. Seperti Bugis, Makassar, dan Betawi, dari beberapa suku yang ada sudah terjadi percampuran budaya sehingga masyarakatnya heterogen. Namun secara umum budaya yang dipegang teguh masyarakat sekitar adalah budaya pesisir, karena faktor geografis dari wilayah tersebut. Mengutip kembali (Wirutomo, 2013) *kultur* merupakan semua norma, kepercayaan, sistem nilai, serta semua kebiasaan kemudian adat istiadat yang sudah terinternalisasi pada individu ataupun masyarakat secara keseluruhan sehingga membentuk sikap dan pola perilaku anggota masyarakat dari dalam. Fokus dari penjelasan kultur yang dipaparkan, penulis mencoba mengambil *output* dari kultur tersebut yaitu pola perilaku dan sikap anggota masyarakat setempat. Hal ini diambil dengan landasan bahwa telah terjadinya percampuran budaya yang sangat turun temurun sehingga tidak ada budaya masyarakat yang sangat menonjol terkecuali aktivitas dari masyarakatnya yang termasuk ke dalam pola perilaku masyarakat.

Kebudayaan yang sudah terinternalisasi pada suatu masyarakat bukan berarti selalu menjadi sistem kehidupan yang terbaik untuk kesejahteraan dan juga martabat manusia ataupun masyarakat tersebut. Tetapi sebagian besar kekuatan yang selalu berupaya mempertahankan kebudayaan eksisting

agar melindungi kepentingan yang dimilikinya kemudian menindas golongan yang lain dengan membenaran budaya (*cultural hegemony*). Maka dari itu diperlukan pembangunan kultural agar terciptanya peningkatan kualitas dari sistem nilai, termasuk adat istiadat yang menahan kesejahteraan rakyat secara langsung seperti dengan edukasi, sosialisasi yang berkepanjangan sebagai suatu proses sosial.

Karena faktor geografis, aktivitas mayoritas masyarakatnya adalah yang berhubungan dengan budaya bahari. Seperti memancing, manangkap ikan serta menjualnya kembali kemudian wisata Bahari dan cagar budaya. Langkah yang dilakukan Pemerintah Provinsi dalam membangun budaya tersebut adalah dengan menunjang dari aktivitas tersebut. Hal yang paling utama Pemerintah Provinsi mengadakan pembinaan untuk masyarakat sekitar demi menunjang agar lebih baik dalam aktivitasnya, selain itu membangun pasar ikan demi pendistribusian ikan yang lebih baik. Hal ini menjadi faktor penting dalam pembangunan sosial pada sektor kultur.

Pembangunan Sosial Elemen Proses

Proses sosial ialah gerak secara terus menerus pada interaksi antara individu masyarakat yang belum terbentuk secara terstruktur (*structured*) begitupun sampai pada mengkultur (*cultured*). Dengan proses sosial yang kreatif dan dinamis, individu ataupun kelompok bisa mengekspresikan aspirasi baik dengan cara yang relatif bebas, dengan menjalankan negosiasi antara anggota masyarakat, seminar, debat kusir pada warung kopi, dialog di TV, komunikasi warga pada dunia maya bahkan sampai dengan demonstrasi. Arena ini dijadikan tempat masyarakat berkompromi keteraturan sampai dapat menjadikan asal dari perubahan struktur ataupun kultur yang sudah ada (*social order is a negotiated order*). Pada praktik pembangunan saat ini, proses sosial acap kali sering dihambat atau dibatasi oleh struktur dan kultur yang diwujudkan untuk kepentingan salah satu ataupun beberapa kelompok. Dampaknya, pembangunan jadi eksklusif hegemonik. Seharusnya, membangun pada proses sosial ialah membangun status kultural maupun struktural pada dalam masyarakat untuk dapat memberikan ruang yang lebih luas demi pengembangan kuantitas dan juga kualitas pada proses sosial tersebut (Wirutomo, 2013).

Proses sosial diartikan sebagai dinamika interaksi sosial antar anggota masyarakat, namun belum terlembagakan ke dalam struktur dan kultur.

Dalam konteks ini, individu dan kelompok dalam masyarakat relatif dapat bernegosiasi secara bebas untuk menyampaikan aspirasinya. Inilah proses sosial, arena yang diyakini sebagai sumber perubahan budaya dan tatanan sosial, seperti yang disampaikan Wirutomo (2011) bahwa tatanan sosial adalah tatanan yang dinegosiasikan. Perkembangan sosial adalah perkembangan proses sosial, yang juga berarti perkembangan budaya dan tatanan sosial dimana anggota masyarakat memiliki lebih banyak ruang sosial untuk perbaikan proses sosial. Proses sosial merupakan cara berhubungan dengan kelompok maupun perorangan yang saling bertemu kemudian menentukan sistem dan bentuk hubungan yang terjalin membuat terjadinya perubahan pola hidup dari sebelumnya.

Perubahan dari struktur sampai kepada kultur dimulai dari proses sosial yang terjadi, sehingga proses sosial mempunyai peranan yang sangat penting. Proses sosial yang terjadi pada penataan Kampung Akuarium dimulai dari masa kampanye pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) di DKI Jakarta pada tahun 2017. Pada masa kampanye, Anies yang masih menjadi calon Gubernur bersama dengan Sandiaga Uno sebagai calon Wakil Gubernur dihadapkan dengan masyarakat yang tinggal di kampung kota untuk diadakannya kontrak politik. Aktor yang terlibat pada kontrak politik tersebut adalah warga yang tergabung kedalam Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) serta organisasi masyarakat salah satunya adalah *Urban Poor Consortium* (UPC).

Pada momentum tersebut beberapa poin dirumuskan dalam kontrak politik yang menjadi tuntutan berbagai organisasi masyarakat yang menjadi perwakilan dari warga kampung kota yaitu; perubahan pada tata ruang perkampungan, legalisasi lahan pada perkampungan, diadakannya program hunian terjangkau untuk rakyat miskin, perizinan yang diberikan untuk pedagang kaki lima, dan yang terakhir bantuan pemerintah provinsi terhadap alih profesi tukang becak. Beberapa poin tersebut dituntut masyarakat jika Anies terpilih menjadi Gubernur selanjutnya demi kesejahteraan masyarakat miskin di Jakarta (Prihatin, 2017). Tuntutan yang dilakukan oleh warga adalah usaha dalam mencapai perhatian dari Pemerintah Provinsi demi dapat tertata dengan baik permukiman Kampung Kota yang sebagian besar dianggap sebagai permukiman kumuh dan ilegal (Andi, as cited in Mahmud & Ardianto, 2020). Tuntutan yang diajukan kepada calon Gubernur Jakarta bertujuan untuk hak fundamental masyarakat yaitu hunian dengan diadakannya legalitas tanah dan penataan kampung (Rochayati as cited in Mahmud & Ardianto, 2020).

Selain hal tersebut, warga juga mengajukan daftar kampung yang ada di Jakarta agar tidak

digusur sebanyak 28 kampung. Kontak politik yang dilakukan tidak hanya menguntungkan sebelah pihak, namun juga pihak dari Anies. Negoisasi yang dilakukan warga adalah dengan janji untuk memenangkan Anies dalam Pilkada (Ardiansa & Raffiudin, 2018), yang kemudian poin dari negoisasi tersebut disepakati bersama.

Setelah menang dalam pilkada, pasca dilantik menjadi Gubernur, Anies kemudian mengundang beberapa perwakilan dari warga kampung diikuti dengan JRMK serta UPC ke Balaikota pada 1 November 2017. Pertemuan tersebut dimanfaatkan oleh perwakilan yang hadir untuk meminta realisasi dari kontrak politik yang sebelumnya sudah dibuat untuk dimanifestasikan sebagai kebijakan ataupun program Pemerintah Provinsi. Kemudian setelah itu warga diajak untuk membahas terkait dengan kebijakan dalam penataan kampung kota untuk merealisasikan kontrak politik tersebut (Marlina et al., 2020).

Selanjutnya realisasi pada kontrak politik tersebut diwujudkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 878 yang sudah dibahas sebelumnya. Kebijakan ini merupakan contoh kolaborasi antara masyarakat dengan pemerintah dalam menyusun dan juga menjalankan kebijakan. Kolaborasi dapat diartikan sebagai bentuk dari kerjasama ataupun dengan berbagi tanggungjawab. Selain itu, kolaborasi dapat diartikan juga sebagai suatu bentuk kerjasama yang dapat saling menguntungkan antara semua pihak dengan berbagi wewenang, tanggungjawab, serta akuntabilitas demi mencapai hasil bersama (Chrislip & Larson, as cited in Fairuza, 2017). Konteks semua pihak dalam definisi tersebut menjelaskan bahwa kolaborasi hanya dapat terjadi jika lebih dari satu pihak.

Selain JMRK dan UPC terdapat pihak lain yang terlibat dalam kontribusi penataan kawasan kampung kota di Jakarta, antara lain *Rujak Center for Urban Studies* (RCUS) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Lembaga yang berkontribusi dalam agenda tersebut mempunyai peranan tersendiri namun secara keseluruhan perannya adalah mendampingi warga Kampung Akuarium.

Pengembangan masyarakat dengan cara sistem kerja yang kolaboratif merupakan bagian dari proses sosial, pada perencanaan pengembangan masyarakat yang paling harus dipertimbangkan adalah proses. Proses perencanaan kolaborasi yang baik akan membawa masyarakat untuk dapat berkontribusi dan menentukan hasil dari perencanaan tersebut sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Dengan pola kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat pada pelaksanaan CAP yang menciptakan pola negoisasi serta diskusi warga dan pemerintah merupakan komunikasi dua arah yang tercipta antara aktor yang

dapat merubah pandangan pembangunan yang mayoritas *top down* kepada pembangunan yang *bottom up*.

Melihat dari kronologi proses dimulai dari masa kampanye Anies sampai dengan pelantikannya menjadi Gubernur, Anies tetap konsisten dalam wacana pembangunan pada masyarakat yang tentunya berpedoman pada pembangunan sosial. Hal ini menggambarkan bahwa proses sosial yang terjadi merupakan keterlibatan dari beberapa aktor sehingga dapat menciptakan dinamika ataupun keadaan yang baik antara masyarakat dan pemerintah sehingga memiliki tujuan yang sama dan juga usaha yang sama dalam mencapainya.

KESIMPULAN

Pada dasarnya pembangunan secara umum bertujuan untuk mewujudkan kehidupan pada masyarakat yang lebih baik. Namun dalam penerapan pembangunan masih terperangkap pada perspektif pembangunan sektoral yang secara umum tidak langsung menyelesaikan permasalahan yang ada pada masyarakat. Jika dianalisa perencanaan pembangunan secara mikro, yang mempunyai kebutuhan dalam tujuan pembangunan adalah masyarakat langsung. Maka dari itu perlu digabungkan lebih luas pembangunan sosial yang lebih memperhatikan manusianya. Pada pembangunan Kampung Akuarium dapat menjadi salah satu percontohan dalam perspektif pembangunan sosial dengan menjelaskan pada ketiga elemen pembangunan sosial yaitu struktur, kultur, dan proses.

Jika ditelaah secara fundamental ketiga elemen pada pembangunan sosial tidak dapat dipisahkan dalam menjelaskan suatu kasus, begitupun urutan dalam mekanisme penjelasan pembangunan sosial karena saling berkaitan. Jika penjelasan Kampung Akuarium dimulai dari pengurusan dapat dijelaskan melalui elemen kultur. Kultur yang dimaksud adalah kebutuhan masyarakat akan hunian untuk tempat tinggal. Kemudian dikeluarkannya kebijakan penyediaan hunian bagi warga termasuk ke dalam elemen struktur yang kemudian melahirkan kultur baru pada masyarakat. Namun dalam perjalanannya tidak terlepas dari elemen proses yang membuat pembangunan sosial pada Kampung Akuarium dapat berjalan.

Dengan melihat kebijakan sebelumnya dengan menggeser permukiman menjadikan masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut menjadi kehilangan hak atas hunian sedangkan hal tersebut bukan yang dibutuhkan masyarakatnya. Namun dengan menggunakan konsep pembangunan sosial

yang diterapkan pada Kampung Akuarium saat ini dapat membuktikan bahwa penataan permukiman kampung kota dapat diselesaikan secara manusiawi dengan melandasi kebutuhan masyarakat sebagai tujuan. Serta dalam praktiknya masyarakat atau warga yang bermukim pada kampung kota diikuti sertakan dalam proses perencanaan pembangunan sampai pada pelaksanaan pembangunan sehingga pelaksanaan pembangunan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I. R. (2008). *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. PT. Rajagrafindo Persada.
- Ardiansa, D., & Raffiudin, R. (2018). *Transaksi Politik Warga: Mendorong Partisipasi Politik Warga Dalam Pemilu dan Perencanaan Pembangunan*. Cakra Wikara Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2020). Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia September 2020. *Berita Resmi Statistik*, 2(17), 1–5.
- Dudwick, N., Kuehnast, K., Jones, V. N., & Woolcock, M. (2006). *Analyzing Social Capital in Context: A Guide to Using Qualitative Methods and Data*. World Bank Institute.
- Fairuza, M. (2017). Kolaborasi antar Stakeholder dalam Pembangunan Inklusif pada Sektor Pariwisata (Studi Kasus Wisata Pulau Merah di Kabupaten Banyuwangi). *Kebijakan dan Manajemen Publik*, 5(3), 1–13.
- Firdaus, M. S. A. (2018). Program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Penyediaan Hunian. *Jurnal Analisis Kebijakan*, 2(2).
- Gentles, S. J., Charles, C., Ploeg, J., & McKibbin, K. (2015). Sampling in Qualitative Research: Insights from an Overview of the Methods Literature. *The Qualitative Report*, 20(11), 1772–1789.
- Gopaldas, A. (2016). A Front-to-back Guide to Writing a Qualitative Research Article. *Qualitative Market Research: An International Journal*, 19(1), 115–121.
- Hardjosoekarto, S. (2012). Construction of Social Development Index as a Theoretical Research Practice in Action Research by Using Soft Systems Methodology. *Systemic Practice and Action Research*, 25(6), 493–509.
- LBH Jakarta. (2017). *Laporan Pengurusan Jakarta 2020*. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta.
- Leedy, P. D., & Ormrod, J. E. (2001). *Practical Research: Planning and Design* (7th ed.). Upper Saddle.
- Levitt, H. M., Motulsky, S. L., Wertz, F. J., Morrow, S. L.,

- & Ponterotto, J. G. (2017). Recommendations for Designing and Reviewing Qualitative Research in Psychology: Promoting Methodological Integrity. *Qualitative Psychology*, 4(1), 2–22.
- Lutfiana, O., Budiyantri, R. B., & Rabindra, I. B. (2019). Evaluasi Nilai-Nilai Sejarah pada Zona Inti Kota Tua, Jakarta Barat, DKI Jakarta. *Seminar Nasional Cendekiawan Ke 5*.
- Madjid, T., & Wirutomo, P. (2006). *Model Pengembangan Public Sphere dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Komunitas Kota: Studi terhadap Pelaksanaan Musrenbang di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara*. Universitas Indonesia.
- Mahmud, F. L., & Ardianto, H. T. (2020). Interaksi Aktor dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik (Studi Kasus Kebijakan Permukiman di Provinsi DKI Jakarta). *Journal of Politic and Government Studies*, 9(2), 231–240.
- Marlina, S. E., Fadli, Y., & Ginanjar, A. (2020). Model Kolaborasi Pembangunan Kawasan Perkotaan: Implementasi Cap dalam Penataan Kampung Akuarium di DKI Jakarta. *Prosiding Simposium Nasional "Tantangan Penyelenggaraan Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0"*, 169–196.
- Mirza, D. S. (2012). Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006-2009. *Economics Development Analysis Journal*, 1(2).
- Mkandawire, T. (2001). *Social Policy in a Development Context* (Vol. 25). United Nations Research Institute for Social Development Geneva.
- Neuman, W. L. (2006). *Sosial Research Methods; Quantitative and Qualitative Approaches* (6th ed.). Pearson International Edition.
- Prihatin, I. U. (2017). *Anis Baswedan: Kemiskinan Paling Ekstrem Ada di Jakarta*. Merdeka.Com. <https://www.merdeka.com/khas/anis-baswedan-kemiskinan-paling-ekstrem-ada-di-jakarta.html>
- Punch, K. F. (2013). *Introduction to Social Research: Quantitative and Qualitative Approaches*. SAGE Publications.
- Rubin, A., & Babbie, E. (2001). *Research Methods for Social Work* (4th ed.). Wadsworth/Thomson Learning.
- Soekanto, S. (2002). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. RajaGrafindo Perkasa.
- Strauss, A., & Corbin, J. (2008). *Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Suparwoko, W. (2013). *Peningkatan Kapasitas Perumahan Swadaya di Indonesia, Peningkatan Kapasitas Perumahan Swadaya di Indonesia*. Total Media.
- Supriyanta. (2002). *Faktor-Faktor Lingkungan yang Mempengaruhi Penghuni Memilih Lokasi Perumahan Baru di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta*. Universitas Gajah Mada.
- Tarigan, R. (2006). *Perencanaan Pembangunan Wilayah, Edisi Revisi*. Bumi Aksara.
- Umasugi, R. A. (2019). *Kampung Akuarium Akan Dibangun Terintegrasi dengan Kawasan Cagar Budaya*. Kompas.Com. <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/10/15/19094531/kampung-akuarium-akan-dibangun-terintegrasi-dengan-kawasan-cagar-budaya?page=all>
- Umasugi, R. A. (2020). *Beda Nasib Kampung Akuarium di Tangan Dua Gubernur*. Kompas.Com. <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/08/19/09321161/beda-nasib-kampung-akuarium-di-tangan-dua-gubernur?page=all>
- Walia, R. (2015). A Saga of Qualitative Research. *Social Crimonol*, 5(2), 124.
- Widjaja, P. (2013). *Kampung Kota Bandung*. Graha Ilmu.
- Wirutomo, P. (2011). Pengembangan Indeks Pembangunan Sosial (IPS) Bagi Sektor Informal di Perkotaan: Menuju Kebijakan Inklusif bagi Usaha Kecil. In *An Unpublished Research Report*.
- Wirutomo, P. (2012). Social Development Policies on Informal Sector in Solo. *BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi*, 18(2).
- Wirutomo, P. (2013). Mencari Makna Pembangunan Sosial: Studi Kasus Sektor Informal di Kota Solo. *Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, 18(1), 101–120.
- Wiryono, S. (2020). *Anies Unggah Foto Pembangunan Kampung Akuarium Dimulai*. Kompas.Com. <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/12/11/09531201/anies-unggah-foto-pembangunan-kampung-akuarium-dimulai>

PERATURAN

- Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 21 Mei 2018. Keputusan Gubernur Nomor 878 Tahun 2018 tentang Gugus Tugas Pelaksanaan Penataan Kampung dan Masyarakat. Jakarta.
- Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 4 September 2018. Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Pemukiman Dalam Rangka Penataan Kawasan Pemukiman Terpadu. Jakarta